



**RESUME LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE REPUBLIK INDIA
TANGGAL 1-7 MEI 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MEI 2011**

**RESUME LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE REPUBLIK INDIA
TANGGAL 1-7 MEI 2011**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI ke India merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Intern Komisi II DPRRI pada tanggal 10 Pebruari 2011.

2. Latar Belakang Kunjungan Kerja

Komisi II DPR RI membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan, dan Ke-Pemilu-an dengan 13 (tig belas) Pasangan Kerja.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi dan penyusunan anggaran melalui kegiatan Rapat, Komisi II DPR RI juga melakukannya melalui kunjungan kerja baik itu kunjungan kerja di dalam negeri maupun kunjungan kerja ke luar negeri.

Republik India memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar, kondisi masyarakat yang beragam baik dari segi kultur maupun tingkat pendapatan ekonomi, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dan memiliki wilayah perbatasan dengan berbagai negara. Kondisi demikian mirip dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam 5 besar dunia, demokrasi yang sedang berkembang, dan memiliki perbatasan dengan beberapa negara, serta sedang membangun suatu sistem administrasi kependudukan, maka Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Republik India adalah dalam rangka untuk mencari pembandingan terkait dengan bagaimana Republik India mengelola perbatasan, reformasi birokrasi dan penanganan pelayanan publik, mengelola sistem informasi administrasi kependudukan, dan kepemiluan.

3. Tujuan Kunjungan Kerja

Untuk memperoleh data, fakta secara langsung terkait dengan pengelolaan perbatasan, reformasi birokrasi dan penanganan pelayanan publik, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, dan kepemiluan (*termasuk dalam penggunaan electronic voting machine, EVM*) oleh India. Data dan fakta dimaksud kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani /mengelola perbatasan, melaksanakan reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik, menjalankan sistem informasi administrasi kependudukan, menyelenggarakan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

4. Nama Delegasi dan Jadwal Kunjungan Kerja

Delegasi Kunjungan Kerja Komisi II DPRRI ke India berjumlah 10 (sepuluh) Anggota, 4 (empat) orang pendamping dari mitra kerja, dan 2 (dua) orang dari Sekretariat Komisi II DPR seperti tercantum dalam daftar berikut ini :

NO	NO. ANGG	N A M A	FRAKSI / KET.
1.	A-178	H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH., MH	Ketua Tim/ Ketua Komisi II
2.	A-433	DRS. DJUFRI	Anggota/F-PD
3.	A-537	IR. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc	Anggota/F-PD

4.	A-194	IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM	Anggota/F-PG
5.	A-214	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	Anggota/F-PG
6.	A-56	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	Anggota/F-PKS
7.	A-94	KH. AUS HIDAYAT NUR	Anggota/F-PKS
8.	A-292	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	Anggota/F-PPP
9.	A-161	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	Anggota/F-PKB
10.	A-14	DRS. AKBAR FAIZAL, M.Si	Anggota/F-P. Hanura
11.	--	PROF.DR.IR. SYAMSUL BAHRI, MSi	Anggota KPU
12.	--	T.H. SOESETYO	Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
13.	--	DRS.H. SOETJAHJO	Direktur Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
14.	--	DR. ANTO SATRIYO NUGROHO	BPPT, (Konsultan Sistem Administrasi Kependudukan, Kemendagri)

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2011, dan mengadakan pertemuan dengan :

- a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik India, dan Komunitas Masyarakat Indonesia di New Delhi;
- b. Kementerian Dalam Negeri India, (*Ministry of Home Affairs, MHA*);
- c. *Unique Identification Authority of India (UIDAI)*
- d. Kementerian Kepegawaian, Penanganan Keluhan Masyarakat dan Urusan Pensiun (*Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*)
- e. Komisi Dalam Negeri (*Committee on Home Affairs*), Rajya Sabha
- f. Komisi Pemilihan Umum India (*Election Commission of India*)
- g. *Deputy Commissioner of Amritsar*
- h. *Border Security Forces (BSF)*
- i. *Real ID Limited, Mumbai*

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik India

Delegasi Kunker Komisi II DPR RI diterima oleh Yang Terhormat **Bapak Letjen (Prun) Andi M. Ghalib, SH, MH** beserta seluruh jajaran Kedubes RI di India.

Selain Komisi II DPR RI, pada pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik India juga hadir delegasi dari Sekretariat Wakil Presiden yang dipimpin oleh Deputy Sekretaris Wakil Presiden, Edi Purwanto dengan 6 (enam) orang anggota delegasi (dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, MRT Jakarta, Kementerian Perindustrian), yang juga sedang mengadakan Kunker ke India untuk melihat pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem informasi administrasi kependudukan, dan penanganan/perencanaan permasalahan transportasi massal di India.

Pada pertemuan ini, Dubes RI untuk Indonesia menjelaskan berbagai kerjasama yang telah dan sedang dijajaki antara Indonesia dengan India dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pertahanan keamanan.

2. Pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik India (*Ministry of Home Affairs, MHA*)

Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Yang Mulia *Minister of State, Mr. Mullapally Ramachandran*.

- Bahwa dalam mengelola perbatasan internasionalnya dengan negara-negara tetangga, India telah membentuk pasukan penjaga perbatasan yang spesifik untuk masing-masing perbatasan, seperti pembentukan *Border Security Force (BSF)* untuk perbatasan India-Pakistan dan India-Bangladesh.
- Untuk meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi untuk mewujudkan *sense of security* bagi masyarakat perbatasan, India menerapkan /menjalankan suatu program yang disebut sebagai *Border Area Development Programme (BADP)*. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan (BADP) merupakan bagian dari pendekatan komprehensif pada pengelolaan perbatasan dengan fokus pada pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan dan peningkatan perasaan keamanan di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Program ini didanai oleh Pemerintah Pusat. Tujuan utama program ini adalah memenuhi kebutuhan pembangunan khusus masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit terjangkau yang terletak dekat perbatasan Internasional.
- BADP diimplementasikan di bawah pedoman yang diatur oleh Komisi Perencanaan. Dananya dialokasikan oleh Komisi Perencanaan setiap tahun yang akan dialokasikan ulang kepada Negara-Negara Bagian Perbatasan dengan mempertimbangkan (i) panjang Perbatasan Internasional (km); (ii) Pendudukan blok perbatasan dan (iii) Wilayah blok perbatasan (km persegi). Bobot 15 % di atas total alokasi juga diberikan kepada Negara Bagian yang memiliki wilayah berbukit/bergurun pasir/*kuch*.

3. Pertemuan dengan *Unique Identification Authority of India (UIDAI)*

Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Yang Mulia *Mr. R.S. Sharma, Director General & Mission Director UIDAI*.

Proyek Identifikasi Unik awalnya dilakukan oleh Komisi Perencanaan sebagai sebuah inisiatif yang akan menyediakan identifikasi untuk setiap penduduk di seluruh negeri dan akan digunakan terutama sebagai dasar untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan murah.

Kartu identifikasi unik yang diterapkan di India dikenal dengan AADHAAR, kartu ini merupakan kartu yang memuat data penduduk India dalam satu chip dengan nomor unik yang terdiri dari 12 digit. Data ini bisa dikoneksikan /dipakai oleh semua instansi/ lembaga, sehingga hal ini bisa mengurangi biaya-biaya dibandingkan apabila sistem identifikasi yang berbeda pada setiap instansi/lembaga. Tujuan dari penggunaan kartu unik ini adalah pemberian identitas unik pada setiap penduduk/individu dengan satu kali pendaftaran. Proses autentifikasi berlangsung sejak awal dan berlaku untuk seterusnya. Jadi UIDAI ini akan menghasilkan satu data base yang bisa digunakan pada kartu identitas yang dipakai di India, seperti kartu SIM, Paspor, Kartu Pemilu, Kartu Bank, data ini akan ditempatkan pada data base e-government India yang dilaksanakan oleh UIDAI. Data yang diambil tidak akan menggambarkan data profiling yang diambil sampelnya, dan ini dilakukan pada setiap penduduk termasuk pada bayi yang baru lahir, jadi data yang tersimpan mungkin tidak akan semuanya dipakai oleh setiap instansi/lembaga. Data yang tersimpan tidak akan dishare/ diperjualbelikan pada pihak lain demi keuntungan ekonomi (kerahasiaan data base personal sangat dijaga). Prinsip pemutakhirannya adalah tidak menggunakan data-data yang telah ada namun menggunakan data biometrik yang dapat diautentifikasi dimana saja dan kapan saja dengan suatu mesin autentifikasi yang portable.

UIDAI merupakan organisasi yang sangat kecil, hanya terdiri dari 384 orang pegawai untuk mengurus penduduk India yang berjumlah lebih kurang 1,2 Milyar penduduk. Untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan kinerja, UIDAI bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pegawai pemerintah, otoritas bank, atau staf di negara-negara bagian yang berinteraksi langsung dengan penduduk. Para pencatat data ini mendata biometrik penduduk melalui *enrolment station* secara langsung dan UIDAI selanjutnya akan menyimpan database ini.

Prinsip pendataan ini adalah semua penduduk India didata melalui sistem identifikasi ini, berlaku bagi penduduk yang jelas alamatnya, ataupun para tunawisma yang tidak mempunyai alamat tetap, terhadap tunawisma.

4. Pertemuan dengan Komunitas Indonesia di India

Beberapa hal yang menjadi perhatian/pertanyaan para peserta pertemuan diantaranya terkait dengan :

- a. Issue atas rencana DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung baru bagi Anggota DPR;
- b. Kerjasama di bidang pengelolaan pertambangan antara Indonesia dengan India yang dinilai belum maksimal.;
- c. Beasiswa bagi pelajar/mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu di India;
- d. Hubungan koordinasi antara DPR di Pusat dengan DPRD.

5. Pertemuan dengan Kementerian Kepegawaian, Penanganan Keluhan Masyarakat dan Urusan Pensiun (*Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*)

Berbagai upaya terus dilakukan oleh India dalam rangka pelaksanaan reformasi administrasi demi terwujudnya *good governance* dan memberikan pelayanan publik yang

terus membaik dari waktu ke waktu, seperti dengan membentuk Lembaga/Departemen Reformasi Administrasi dan Penanganan Keluhan Publik (*Department of Administrative Reforms and Public Grievances, DARPG*), yang berada di bawah Kementerian Kepegawaian, Penanganan Keluhan Masyarakat dan Urusan Pensiun (*Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*). Lingkup kegiatan dari lembaga ini adalah:

- a. Melaksanakan upaya-upaya reformasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara, termasuk e-governance dan penerapan best practises.
- b. Membuat kebijakan sekaligus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan publik,
- c. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah maupun institusi profesional terkait dengan manajemen publik.
- d. Menginisiasi hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang bersifat pro rakyat. Salah satunya adalah melalui Integrated Sevottam Model.

Sevottam adalah Kerangka kerja yang terintegrasi untuk meningkatkan pemberian pelayanan. Sevottam memiliki 3 komponen utama, yakni :

- a. Citizen's Charter (Piagam Warga)
- b. Mekanisme penanganan keluhan masyarakat
- c. Kemampuan pemberian pelayanan

DARPG bertanggung jawab untuk:

- a. Mempromosikan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, kesiapan struktur organisasi sebagai bagian dari NeGP.
- b. Pengembangan kapasitas dan perubahan manajemen.
- c. Pengimplementasian e-office dan India Portal, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) melalui peningkatan mekanisme arus kerja dan prosedur tertulis di masing-masing kantor.

Beberapa kegiatan berskala nasional yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah :

- a) Pemberian Penghargaan Perdana Menteri (Prime Minister's Award)

- Penghargaan ini diperuntukkan bagi petugas-petugas pelayanan di pemerintahan pusat maupun daerah, yang dinominasikan oleh pemerintah, LSM/NGO, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan menginspirasi PNS agar mampu berinovasi dalam rangka menghasilkan hal-hal yang bermanfaat (baik kuantitatif maupun kualitatif) bagi masyarakat luas.
- Penghargaan ini diberikan untuk kategori perorangan, kelompok, maupun organisasi, dimana bentuk penghargaan tersebut adalah berupa medali, piagam dan uang tunai.
- Dalam menentukan pihak yang layak penerima penghargaan, Komite Ahli yang dipimpin oleh Sekretaris ARPG (Administrative Reform and Public Grievances) melakukan eksaminasi dan studi lapangan untuk merekomendasikan para nominator. Selanjutnya suatu Badan yang bernama Empowered Committee, yang diketuai oleh Sekretaris Kabinet akan mempertimbangkan nominator yang telah disampaikan oleh Komite Ahli, untuk kemudian disetujui oleh Perdana Menteri.

- b) Peringatan "Civil Service Day" (sejak tahun 2006)

Diperingati setiap tanggal 21 April untuk merayakan semangat pelayanan sipil sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan introspeksi diri.

- c) Conference of Chief Secretaries

Diadakan dalam rangka bertukar pandangan mengenai pembangunan global, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi-solusi terhadap isu-isu yang berkembang terutama yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri, kenaikan harga, pemberian pelayanan, dan lain-lain.

6. Pertemuan dengan Komisi Dalam Negeri (*Committee on Home Affairs*), Rajya Sabha
Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Yang Mulia **Mr. M. Venkaiah Naidu, Chairman Committee on Home Affairs, Rajya Sabha** dan **Anggota Rajya Sabha** serta beberapa **Anggota Lhok Sabha**.

Dalam pertemuan ini kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai fungsi yang dilakukan di masing-masing parlemen, sistem pemilu yang ada, masalah otonomi daerah serta perkembangan demokrasi di kedua negara.

Juga dijelaskan mekanisme kerja anggota Rajya Sabha dan peran masing-masing *Legislative Assembly* di negara bagian, hubungan *Legislative Assembly* dan *Rajya Sabha Council of States*.

7. Pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum India (*Election Commission of India*)
Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, **Chief Election Commissioner, Mr. Dr.S.Y. Quraishi** dengan didampingi oleh dua orang **Anggota Komisi Pemilu India, yaitu Mr. V.S. Sampath dan Mr. H.S. Brahma**.

- Pemilu di India dilakukan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum India (*Election Commission of India, ECI*) yang hanya beranggotakan tiga orang, terdiri dari satu Ketua, dan dua orang komisioner dengan didukung oleh Kesekretariatan dengan jumlah petugas dan staff saat ini sekitar 300 orang. Sedangkan di tingkat Negara Bagian, terdiri atas 1 orang ketua yang dibantu oleh 8 hingga 10 orang staff. Untuk tingkat Distrik dan pemilih, jumlah petugas dan staff administrasi mencapai dua kali lipat dari petugas Pemilu;
- Fungsi utama dari ECI adalah melaksanakan serta mengawasi seluruh proses tahapan Pemilu di India baik Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Beberapa fungsi tersebut antara lain adalah, mencatat Parpol-Parpol peserta Pemilu, mengawasi pelaksanaan kampanye, memfasilitasi peliputan terhadap jalannya pelaksanaan Pemilu oleh media, sekaligus mengupayakan meningkatnya tingkat kepedulian dan partisipasi pemilih. Disamping itu, berdasarkan konstitusi, ECI memiliki hak untuk mengajukan pendapat kepada Presiden dan Gubernur Negara-Negara Bagian terkait keabsahan para calon legislator yang terpilih;
- Unsur-unsur yang selama ini menjadi sumber kekuatan bagi ECI dalam melaksanakan tanggungjawabnya adalah: Konstitusi, Parlemen beserta seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, Mahkamah Agung, Media, Partai Politik, Birokrasi, dan tentu saja masyarakat.
- Disamping ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada, dikenal pula suatu model yang menjadi dasar yang harus ditaati oleh para peserta pemilu, yaitu yang dibuat berdasarkan konsensus dari partai-partai politik, dan telah menjadi dasar moral bagi semua yang terlibat. Namun demikian, konsensus ini tidak dijadikan sebagai undang-undang, dan banyak ketentuan-ketentuannya yang tidak dapat memaksa secara hukum.
- ECI juga memiliki ketentuan dan fasilitasi yang khusus diperuntukan bagi kalangan minoritas, wanita, maupun orang cacat.
- Pada tahun 1982, mulai diperkenalkan sebuah alat yang berfungsi sebagai mesin pemberi suara yakni EVM (*Electronic Voting Machine*). Alat ini pertama kali dicoba

pada 50 dari 84 TPS yang ada di Kerala, India Selatan. Dalam perkembangannya semakin banyak permintaan dari berbagai daerah di India untuk penggunaan EVM ini, sehingga dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang untuk mensahkan penggunaan EVM dalam Pemilu. Pada tahun 2004 dan 2009, EVM resmi digunakan dalam Pemilu. EVM ini dapat menghemat anggaran Pemilu sampai dengan 60% (lebih sedikit kertas). EVM dapat dikatakan memiliki tingkat kecermatan yang sangat tinggi baik secara administratif maupun teknis.

8. Pertemuan dengan *Deputy Commissioner of Amritsar*

Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Yang Mulia **Mr. K.S. Pannu**, *Deputy Commissioner of Amritsar*. Deputy menyampaikan ucapan selamat datang dan menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI ke Amritsar. Diharapkan agar kunjungan ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan India.

Amritsar merupakan salah satu distrik yang berada di Negara Bagian Punjab yang terdiri dari 20 (dua puluh) distrik, setiap distrik dibagi menjadi 4 (empat) sub division, setiap daerah sub division dibagi lagi menjadi pemerintahan daerah setingkat desa. Setelah ada pemisahan wilayah (Pakistan menjadi negara sendiri), maka Distrik Amritsar kemudian menjadi dua bagian yang terpisahkan secara teritori, satu bagian masuk ke daerah India dan satu bagian masuk ke wilayah Pakistan, salah satu daerah perbatasan yang terdapat pos perbatasan adalah di daerah *Wagah* (Wagah Border). Sebelum terpisah menjadi dua bagian, Amritsar beribukota di Lahore (sekarang berada di wilayah Pakistan) dan daerah ini termasuk daerah yang maju secara ekonomi, namun setelah mengalami pemisahan, wilayah Amritsar mengalami kemunduran ekonomi, namun sejalan dengan perjalanan waktu dan penerapan berbagai program pembangunan melalui Border Area Development Program, maka wilayah perbatasan secara berangsur menampakkan kemajuannya.

Untuk menjaga keamanan daerah perbatasan, terdapat dua institusi yang menjalankan fungsinya, yaitu : Kementerian Pertahanan pada tingkat Pemerintah Federal (Pusat) berfungsi menjaga perbatasan dari serangan negara lain, sedangkan Kementerian Dalam Negeri mempunyai paramiliter yang bertugas di Border Security Force, untuk menjaga perbatasan terhadap lalu lintas manusia dan perdagangan.

Sumber pendapatan keuangan Distrik Amritsar berasal dari perolehan pajak Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Penghasilan, dan Pajak atas Jasa, sedangkan dari Pemerintah Negara Bagian adalah pembagian dari Pajak Pabean dan Pajak Makanan. Negara Bagian Punjab merupakan penyumbang terbesar atas pangan di India, yakni mencapai 60%. Distrik Amritsar merupakan distrik yang memperoleh bantuan keuangan terbesar baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Negara Bagian. Pembagian keuangan didasarkan pada parameter jumlah penduduk dan kedudukan suatu daerah, seperti status daerah khusus.

Penentuan besarnya distribusi keuangan kepada Negara Bagian dilakukan oleh suatu komisi keuangan tingkat pusat, sedangkan pembagian keuangan kepada distrik, sub division dan municipalities dilakukan oleh komisi keuangan tingkat negara bagian. Komisi keuangan di masing-masing tingkat memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Terkait dengan birokrasi yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik, dijelaskan bahwa ini terdiri dari pegawai negeri federal (nasional, yang bisa pindah ke seluruh india)

dan pegawai negeri sipil tingkat negara bagian saja. Biaya belanja untuk pegawai, berkisar 75% dari total APBD-nya.

Untuk dana pembangunan ada dua sumber : pertama dari pemerintah federal melalui Border Area Development Program (BADP) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan pembangunan pada area sekitar 10 km dari border, dana ini dikelola oleh distrik, dan yang kedua dana khusus dari negara bagian untuk prioritas pada pengembangan investasi.

9. Pertemuan dengan *Border Security Forces (BSF)*

Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh **Komandan Batalyon Inspector General BSF**, Yang Mulia **Himmat Singh**

Dijelaskan bahwa, pasukan BSF berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri India. Pasukan BSF bertugas menjaga perbatasan atas lalu lintas orang dan barang.

BSF dibentuk, sebagai akibat dari adanya invasi Pakistan pada tahun 1964. pada tanggal 1 Desember 1965 Parlemen India meminta agar dibentuk Border Security Force yang ditentukan/ disesuaikan dengan karakteristik wilayah perbatasan masing-masing.

BSF bertugas :

- a. Memberikan esensi keamanan bagi penduduk di daerah perbatasan;
- b. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran pelintas batas baik yang masuk maupun yang keluar tanpa adanya otorisasi;
- c. Mencegah terjadinya kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan manusia dan barang.

Selain itu, BSF memiliki tugas tambahan, yaitu :

- a. menjaga keamanan internal negara bagian yang bersangkutan;
- b. mengantisipasi adanya penyusupan;
- c. mengeliminir kegiatan kelompok garis keras/pembangkok;
- d. membantu pengamanan Pemilu di negara bagian.

Saat ini BSF menjaga perbatasan India – Pakistan dan India – Bangladesh dengan dua ratus ribu personel yang tergabung dalam 160 batalyon. BSF merupakan salah satu pasukan elit angkatan bersenjata India yang memiliki keahlian khusus pengamanan daerah perbatasan, kemampuan operasional dan training.

Motto BSF adalah : “Melaksanakan Tugas Utama Sampai Titik Darah Penghabisan.”

Markas besar BSF yang bermarkas di Jalandhar, pada tahun 1965 sampai dengan 1972 mempunyai kewenangan untuk mengamankan perbatasan wilayah barat sepanjang daerah Jammu Kashmir hingga Gujarat, sepanjang 3000 km, namun setelah tahun 1972 dengan adanya pembagian negara bagian, maka hanya mengawasi perbatasan di Negara Bagian Punjab saja.

Terdapat tiga hal unik yang berada di Wagha Border ini, yaitu :

- a. perbatasannya sangat dekat, tidak ada zona demiliterisasi, saling menempel;
- b. upacara pergantian pasukan penjaga perbatasan kedua negara;

- c. latihan-latihan kedua pasukan penjaga perbatasan secara simultan yang juga dapat disaksikan secara langsung, ini menunjukkan semangat kompetisi di antara kedua belah pihak.

Dalam 1.5 (satu setengah) tahun terakhir, terjadi perkembangan yang sangat signifikan dimana kedua belah pihak, India dan Pakistan sepakat membuka jalur bagi truk-truk yang membawa komoditi perdagangan keluar dan masuk perbatasan, ini dimaksudkan untuk lebih menggalakan perekonomian kedua negara.

10. Pertemuan dengan *Real ID Limited, Mumbai*

Delegasi diterima oleh Direktur dan Pendiri Real ID Limited, Yang Mulia **Mr. C.S.S. Rao**. Ketua delegasi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) yang on-line dan menargetkan pada tahun 2012 sudah bisa melaksanakan program e-KTP bagi penduduk Indonesia yang berbasis *chip* untuk menyimpan Nomor Induk yang unik, Sidik Jari, dan Biometrik.

Kartu identitas (e-KTP) yang dipresentasikan oleh Real ID merupakan kartu identitas penduduk yang berteknologi tinggi berbasis smart card yang didalamnya tertanam chip berkapasitas 2 MB yang bisa juga diaplikasikan bagi penunjang pelaksanaan e-governance, bukan sekedar sebagai kartu tanda pengenal semata. Dengan kapasitas yang besar ini maka dimasa yang akan datang dimungkinkan untuk menambah fitur/keterangan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dengan KTP semacam yang diperkenalkan Real ID Ltd ini dapat digunakan pada berbagai aspek kehidupan yang memerlukan identitas, seperti Kartu Bank, Kartu Pajak / NPWP, dan Kartu Askes. Semua transaksi/mutasi kepemilikan barang berharga seperti pembelian tanah / mobil yang mengharuskan tercatat pada sistem administrasi negara dapat dilacak, dengan demikian tujuan tertib administrasi dapat dicapai. Demikian juga mutasi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan negara seperti pemekaran daerah, maka data yang terkait dengan kode wilayah juga dapat dilakukan oleh sistem yang ada pada Kartu yang ditawarkan oleh Real ID ini, jadi mutasi dimaksud merupakan bagian dari histori transaksi/mutasi data pemegang kartu ini.

Mengingat kegunaan e-KTP ini yang beragam, maka untuk proyek teknologi informasi berskala nasional tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan sukses bilamana diterapkan dengan menggunakan pendekatan *public private partnership (3P)* yang berguna untuk mencegah pencurian, penyalahgunaan fasilitas milik negara atau manipulasi identitas penduduk. Dengan pendekatan 3P ini maka semua transaksi perubahan kepemilikan diharuskan menunjukkan e-KTP, transaksi dimaksud akan terekam dalam smart card e-KTP dan pihak penjual harus melaporkan pada transaksi tersebut kepada pihak terkait sehingga data dimaksud dapat disimpan di Pusat Data Elektronik Nasional (yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat).

Kartu identitas yang diperkenalkan Real ID merupakan Kartu yang bisa berlaku secara nasional dan untuk berbagai sektor, dengan tingkat keamanan kartu ini sangat tinggi dan tidak akan bisa diduplikasi. Jadi tidak akan ada lagi satu penduduk yang mempunyai lebih dari satu KTP, karena dalam sistem ID ini ada 25 *feature* penyaringan keamanan, selain itu kartu ini telah menggunakan fitur biometrik, cap telapak tangan dan 6 digit PIN. Kartu ini memiliki 18 (delapan belas) digit, tiga digit pertama merupakan kode negara, digit selanjutnya dapat diatur menurut kebutuhan seperti untuk kode provinsi, kode jenis kelamin, kode status, kode spesifik pemegang kartu dan sebagainya serta kode keamanan. Kartu ID (e-KTP) memberi manfaat sebagai alat penghubung yang efektif antara warga dengan pemerintah di era e-governance, memastikan terciptanya tertib administrasi yang efisien juga efisien dalam hal pembiayannya.

Keunggulan yang ditawarkan pada e-KTP ini adalah :

- a. Merupakan sistem ID multifungsi yang terpadu dan handal;

- b. Membantu pemerintah bermigrasi dari arsip kertas ke arsip elektronik;
- c. Dapat diaplikasikan secara offline dan online;
- d. Dapat digunakan pada bermacam pelayanan, sehingga tidak perlu banyak kartu untuk bermacam transaksi, ini sangat menghemat anggaran;

III. KESIMPULAN

Dari kunjungan Kerja ini Dewan dapat mengambil sisi positif dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara lain dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya. Hal ini dapat menjadi pembandingan dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam bidang legislasi dan pengawasan atas kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan perbatasan, reformasi birokrasi dan penanganan pelayanan publik, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (termasuk penerapan e-KTP dan *Single Identity Number*), dan pemilihan.

